

KOORDINASI LURAH DENGAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KANAAN KOTA BONTANG

Steven Octavianus Putra¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dari koordinasi antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat. Adapun yang menjadi narasumber Lurah, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), staf-staf di Kelurahan Kanaan, Kasi pemberdayaan Masyarakat, anggota LPM, dan Ketua Rukun Tetangga (RT) 11, ketua RT 12, Masyarakat yang memberikan informasi sesuai yang dibutuhkan penulis. Koordinasi antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan sudah baik dengan mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di dalam Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sudah berjalan optimal meskipun bukan hal yang mudah untuk melaksanakan pembangunan agar berjalan dengan lancar, oleh sebab itu Perencanaan yang matang sangat dibutuhkan agar pembangunan bisa berjalan dengan baik. Selain itu rapat yang dilakukan Lurah, LPM, RT, Masyarakat, tokoh-tokoh Agama dan Adat sangat membantu proses pembangunan yang ada di Kelurahan Kanaan. Faktor pendukung dalam penelitian ini adalah Partisipasi masyarakat dan sporting dana atau anggaran dimana partisipasi yang tinggi dari lingkungan masyarakat sangat penting untuk membantu proses pembangunan agar dapat menghasilkan pembangunan yang baik serta bantuan dana juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam pembangunan. Faktor penghambat merupakan hal yang paling mendasar dari suatu koordinasi dalam pembangunan. Hal tersebut yang menjadikan pola koordinasi di Kelurahan Kanaan tidak berjalan sepenuhnya, sebagaimana diketahui bahwa faktor penghambat yang ditemukan penulis yaitu kurangnya Koordinasi/komunikasi dan kesadaran masyarakat serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat cenderung masa bodoh atau tidak peduli dalam pembangunan yang ada yang kemudian menjadi fakta penguat bahwa terjadinya ketimpangan dari teori koordinasi yang seutuhnya.

Kata Kunci: *Koordinasi, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pembangunan, kanaan.*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: stevenoctavianus@gmail.com

Pendahuluan

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 18 tahun 2002 tanggal 17 agustus 2002. Kanaan berubah status menjadi sebuah kelurahan dan yang dipimpin seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat. Tugas pokok Kelurahan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam wilayah Kecamatan Bontang Barat dan mempunyai tugas menyelenggarakanurusan pemerintahan, pembangunan, dan kemsyarakatan dan juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan Kelurahan. Sedangkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sendiri berdiri sejak Kanaan menjadi Kelurahan dan yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pertama yaitu Ibu Ester Madao senagai ketua dan wakil ketua M. alimin BA dan beranggotakan 7 orang.

Salah satu fungsi dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kelurahan mempunyai fungsi (*Laporan Akuntabilitas Kenirja Instansi Pemerintahan Tahun 2009*) yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan dan melakukan koordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan instansi vertical yang berada di wilayah kerjanya.
2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum terhadap masyarakat dan menyelenggarakan ketentraman umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pembinaan lembaga kemasyarakatan
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Kepala Daerah melalui Camat.
4. Pelaksanaan Koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Sehubung dengan hal tersebut, maka salah satu faktor yang ikut menentukan pembangunan daerah adalah Koordinasi yang dilakukan Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk menggerakkan, mengkoordinasi, membina, membimbing dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan Lurah serta memberikan inisiatif dan berperan aktif dalam membangun daerahnya. Kelurahan merupakan mediator utama yang menghubungkan antara warga masyarakat setempat dengan pemerintah pusat khususnya daerah Kota Bontang, maka kelurahan berkewajiban untuk menjaga kekeluargaan yang terjalin sebagai bentuk sikap toleransi dan saling menghormati.

Pada umumnya telah disadari pentingnya Koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan akan tetapi berdasarkan observasi sementara bahwa kenyataan tidak jarang terdapat berbagai kendala seperti Normalisasi sungai untuk pencegahan banjir, pembuatan parit kiri dan kanan jalan damai khususnya di RT.09/11 dan pembangunan jembatan dibelakang Puskemas Kaaan yang sudah 3 tahun tertunda tidak ada lanjutan pekerjaanya yang menyebabkan pelaksanaan

Koordinasi yang dipraktekkan tidak berjalan optimal sehingga pencapaian tujuan dan sasaran tidak selalu berjalan dengan lancar dan semestinya.

Pada akhirnya yang diharapkan dengan adanya musyawarah tersebut melalui Koordinasi dapat dipecahkan masalah keserasian proyek-proyek Pembangunan. Faktor penghambat dalam Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berdasarkan observasi sementara adalah terkait dengan masalah bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan penjelasan diatas, hal ini dimaksud untuk mengetahui apa saja yang merupakan masalah-masalah Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan. Atas dasar inilah, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat”.

Kerangka Dasar Teori

Koordinasi

Menurut Sondang P siagan (2001:110), koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalama usaha mencapai tujuan bersama pula agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi satu kebulatan yang terintegrasi dengan cara seefesien mungkin.

Dalam administrasi pemerintah, koordinasi dimaksudkan untuk menyerasihkan dan menyatu padukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oaleh pejabat pimpinan dan kelompokj pejabat pelaksana. Untuk melengkapi metode dan teknik koordinasi Handyaningrat (2000:124), menjelaskan “Koordinasi melakukan kewenangan, consensus, pedoman kerja, forum melalui konferensi.

Pembangunan

Menurut Sunyoto (2010:5), pembangunan adalah memacu pertumbuhan di Negara sendiri, pemerintah dapat menempatkan posisinya antara lain: sebagai pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi, sebagai konsumen, produsen sekaligus investor, sebagai pengelola perusahaan (Negara) dan sebagai pengatur masyarakat (regolator).

Pembangunan harus diartikan lebih dari pemenuhan kebutuhan materi didalam kehidupan manusia. Menurut Michael P. Todaro yang dikutip oleh Kunarjo (1987:6) mengatakan bahwa pembangunan seharusnya merupakan proses multidimensi yang meliputi perubahan organisasi dan orientasi dari seluruh system sosial dan ekonomi.

Menurut Lemhanas (2002:6), teori pembangunan pada awalnya adalah teori pembangunan ekonomi yang merupakan suatu rangkaian usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi dunia. Teori pembangunan ekonomi tersebut berkembang kerah

pendekatan politik, sosial budaya dan pendekatan penyeluruhan pada setiap aspek kehidupan.

Pembangunan dari uraian diatas adalah suatu rangkaian usaha dan kegiatan dalam melakukan suatu perubahan menuju keadaan yang lebih baik dari yang lama menjadi yang baru dan perubahan ini direncanakan oleh suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan suatu bangsa.

Lurah

Menurut Peraturan Pemerintahan No 73 Tahun 2005 pasal 3 ayat 1, Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.

Lurah merupakan pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Seorang lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pemerintahan kelurahan berbeda dengan pemerintahan Desa. Kelurahan biasanya terdapat di daerah perkotaan. Perbedaan desa dan kelurahan dapat dilihat dari pemimpin dan cara pemilihannya. Kepala kelurahan sering disebut Lurah. Lurah diangkat dan dipilih oleh pemerintah. Lurah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mampu dan cakap dalam menjalankan tugas. Lurah diangkat oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kecamatan dari pegawai negeri sipil yang berprestasi. Syaratnya, dia harus mampudan menguasai pengetahuan tentang pemerintahan. Selain itu, memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan PerUU.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2002 pasal 10 dan 11, menyatakan bahwa di Kelurahan dapat di bentuk lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 10 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan, Pembangunan, social kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Yaitu menguraikan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diselidiki.

Adapun fokus penelitian yang peneliti tetapkan meliputi:

1. Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) :
 - a. Koordinasi dalam perencanaan pembangunan.
 - b. Koordinasi dalam menggerakkan swadaya gotong royong untuk pembangunan.
 - c. Koordinasi dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat.

Hasil Penelitian

Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Koordinasi dalam perencanaan pembangunan

Koordinasi akan terjadi jika kita melakukan planning sebelum melaksanakan kegiatan tersebut. Perencanaan mengenai langkah apa saja yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan puncak. Bukan hal mudah memang tapi juga bukan hal yang sulit jika kita mau berfikir. Dengan perencanaan maka kita tahu sampai sejauh mana orang lain dapat membantu kita serta kita akan bisa mensinkronkan setiap langkah sehingga yang terjadi bukannya interfrensi mala justru saling mendukung. Hasil wawancara dengan Lurah Kanaan Bapak Deddy menyampaikan:

“... Koordinasi yang dilakukan Lurah bersama LPM berjalan dengan baik bahkan peran LPM juga sangat membantu Lurah dalam kegiatan pembangunan bahkan mengikut sertakan Warga Kelurahan Kanaan, Ketua RT serta tokoh-tokoh Adat dan Agama, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kelurahan Kanaan dibidang pembangunan, sasarannya adalah menjadikan Kelurahan Kanaan menjadi salah satu kelurahan terbaik yang ada di Kota Bontang maupung tingkat Provinsi Kalimantan Timur” (Wawancara, tanggal 17 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) melibatkan warga Kelurahan Kanaan, ketua RT, Tokoh-tokoh Adat dan Agama dalam menyelesaikan masalah pembangunan yang ada di Kelurahan Kanaan.

Didalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Kanaan diadakan Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh Lurah yang bertujuan untuk membentuk keserasian dan keterpaduan dalam suatu tujuan dan bekerjanya aparatur Kelurahan maka perlu adanya pengaturan dapat berwujud suatu peraturan tat tertib dan kerjasama keseluruhan, karena dalam rapat Koordinasi tersebut akan terdapat tukar pendapat dan aspirasi untuk program yang akan dilaksanakan.

Menurut Sunyoto (2010:5), prioritas pembangunan adalah memacu pertumbuhan di Negara sendiri, pemerintah dapat menempatkan posisinya antara lain: sebagai pelaksana kebijaksanaan ekonomi, sebagai konsumen, produsen sekaligus investor, sebagai pengelola perusahaan (Negara) dan sebagai pengatur masyarakat (regulator).

Koordinasi tersebut diharapkan dapat menciptakan komunikasi dengan beberapa pihak untuk pencapaian terlaksananya program Pembangunan tentang tujuan yang ingin dicapai. Lurah Kanaan melakukan koordinasi kepada satu pihak kepada pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Rapat

koordinasi diperlukan untuk menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat Kanaan tentang tujuan dan sasaran pembangunan.

Koordinasi juga tidak jauh dari Musrembang dimana Musrembang merupakan agenda tahunan dimana warga bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencana (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasarkan urusan dan alokasi anggaran. Musrembang dikelurahan dilaksanakan setiap bulan Januari.

Koordinasi dalam Menggerakkan Swadaya Gotong Royong untuk Pembangunan

Berdasarkan wawancara dengan Lurah Kanaan, Bapak Deddy, beliau memaparkan :

“... sangat baik, tidak diragukan, karena masyarakat Kanaan pekerja keras dan selalu mengutamakan kekeluargaan dan selalu aktif jika ada kegiatan kerja bakti untuk lingkungan masing-masing.” (wawancara, 17 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak luput dari gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Kanaan untuk membangun Kelurahan Kanaan lebih baik lagi.

Setiap kegiatan gotong royong juga tidak jauh dari koordinasi antara Lurah dengan Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RT 11 Ibu Mona Ratuliu memaparkan:

“... setiap satu kali sebulan saya dan warga ada kegiatan gotong royong atau kerja bakti yang dilaksanakan setiap hari minggu karena pas hari libur supaya warga RT11 bisa bersama-sama membersihkan wilayah masing..” (wawancara, 4 Januari 2019) Berdasarkan hasil wawancara kegiatan gotong royong yang dilakukan warga RT 11 tidak jauh dari Peran Ketua RT dimana setiap 1 bulan sekali warga bersama-sama melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan masing-masing.

Koordinasi dalam Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan

Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Lurah Kanaan berjalan dengan baik dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) selalu berkoordinasi dengan Lurah apabila sedang ada program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Kanaan. Hal ini berdasarkan teori pendukungnya yaitu menurut Abdurrachman (2000:54), Koordinasi adalah kegiatan-kegiatan untuk menertibkan, sehingga segenap kegiatan manajemen maupun kegiatan pelaksanaan satu sama lain tidak simpang siur, tidak berlawanan dan ditunjukkan titik arah pencapaian tujuan dengan efisien. Dengan demikian bahwa koordinasi yang dilakukan Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

(LPM) dengan masyarakat berjalan dengan baik sesuai dengan Tugas Lurah dan LPM.

Faktor-faktor Pendukung dalam Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Kanaan:

Faktor pendukung dalam koordinasi antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Kelurahan Kanaan adalah salah satu cara untuk mengetahui apa saja faktor pendukung yang ada. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Deddy selaku Lurah Kanaan:

“...Semua tidak terlepas atas kerjasama baik Kelurahan, LPM, RT, dan warga yang selalu berkerja sama dengan baik untuk membangun Kelurahan Kanaan menjadi lebih baik kedepannya, serta keikutsertaan masyarakat Kelurahan Kanaan dalam Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan Pembangunan yang diadakan 1 bulan sekali bahkan lebih tergantung situasi dan kondisi, yang mana hasil rapat tersebut dapat membantu pihak Kelurahan dalam menentukan skala prioritas yang menjadi kebutuhan Kelurahan Kanaan dan hasil rapat tersebut akan disampaikan kepada Kecamatan yang nantinya akan melalui proses Verifikasi dan nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Bontang dan salah satu faktor pendukung dalam pembangunan yang ada adalah terletak pada supporting dana/anggaran baik itu dari PEMKOT atau swasta untuk pelaksanaan pembangunan di Kanaan” (wawancara, 17 Desember 2018)

Selain Lurah Kanaan Penulis juga mewawancarai salah satu anggota LPM Bapak Andarias Tiku, beliau menyampaikan:

“... koordinasi lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat di kanaan disini sangat baik yah apa lagi setiap ada pembangunan yang ada pasti dirapatkan sebelum dilakukan, salah satu faktornya adalah peran masyarakat disini juga sangat baik apalagi masyarakat sering memberikan masukan kepada kami untuk disampaikan kepada Lurah agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan lancar apa lagi masyarakat juga sering ikut rapat yang dilaksanakan di kelurahan untuk membahas pembangunan yang ada di Kelurahan Kanaan” (wawancara, 13 April 2019)

Penulis juga mewawancarai salah satu warga RT 5 ibu Krisna Della dimana beliau menyampaikan:

“pembangunan yang ada di kelurahan kanaan disini sangat baik yah apalagi masyarakat disini selalu mendukung apa saja yang dilakukan oleh Pihak Kelurahan untuk membangun Kanaan lebih baik lagi.” (wawancara, 13 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui faktor pendukung Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Kanaan adalah:

Partisipasi Masyarakat

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Kanaan untuk terlaksana dengan maksimal perlu adanya kepekaan atau kesadaran masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan yang telah berjalan maupun yang belum berjalan sehingga dapat menghasilkan out put yang baik. Keikutsertaan masyarakat Kelurahan Kanaan dalam rapat dan Pelaksanaan Pembangunan yang diadakan Kelurahan Kanaan sangat menunjang pencapaian pembangunan Kelurahan Kanaan, Rapat tersebut di selenggarakan 1 bukan sekali bahkan lebih tergantung kondisi dan situasi, yang mana hasil rapat tersebut akan diserahkan kepada Kecamatan yang nantinya akan melalui proses verifikasi dan nantinya akan diberikan kepada Pemerintah Kota Bontang.

Support Dana atau Anggaran

Dana atau anggaran adalah salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Kelurahan Kanaan karena setiap pelaksanaan pembangunan pasti memerlukan dana untuk proses pembangunan.

Faktor-faktor Penghambat dalam Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Kanaan:

Hambatan Eksternal

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan pembangunan kepada masyarakat, merupakan salah satu hambatan eksternal. Kurangnya sosialisasi menyebabkan pembangunan menjadi lambat, hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak mengetahui akan diadakan kegiatan pembangunan, sehingga ketika akan melakukan kegiatan warga masyarakat banyak yang tidak dapat ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sedangkan masyarakat merupakan salah satu unsure terpenting dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga di kelurahan kanaan Ibu Anne Hasim beliau memaparkan:

“saya sebagai warga Kanaan sangat mendukung pembangunan yang ada di Kelurahan Kanaan namun selepas itu sebaiknya pihak pemerintah atau yang bersangkutan dengan pembangunan yang ada di Kelurahan Kanaan melakukan sosialisasi seperti apa saja yang akan dilakukan supaya warga lebih paham dan mendukung pembangunan yang ada di Kelurahan Kanaan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sosialisasi sangat penting bagi warga Kelurahan Kanaan sehingga warga tahu apa saja pembangunan yang akan di lakukan oleh pihak yang bersangkutan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Koordinasi antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan sudah baik dengan mengadakan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrembang) di dalam Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sudah berjalan optimal meskipun bukan hal yang mudah untuk melaksanakan pembangunan agar berjalan dengan lancar, oleh sebab itu Perencanaan yang matang sangat dibutuhkan agar pembangunan bisa berjalan dengan baik. Selain itu rapat yang dilakukan Lurah, LPM, RT, Masyarakat, tokoh-tokoh Agama dan Adat sangat membantu proses pembangunan yang ada di Kelurahan Kanaan .

2. Gotong royong adalah salah satu kegiatan dimana setiap warga bersama-sama untuk membangun atau melakukan kegiatan yang sifatnya membantu pembangunan yang ada di Kelurahan Kanaan Kota Bontang. Gambaran keberhasilan baik dari segi waktu, tenaga dan target penyelesaian di dalam Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) semua tidak terlepas atas kerjasama yang baik antara Lurah, LPM, RT, Warga Serta Tokoh-tokoh Adat dan Agama yang selalu mendukung dalam proses pembangunan yang ada.
3. Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan melakukan rapat Koordinasi yang ada di Kelurahan Kanaan bertujuan untuk membahas apa saja yang akan dilakukan atau dilaksanakan yang menyangkut pembangunan yang ada.
4. Faktor pendukung dalam penelitian ini adalah Partisipasi masyarakat dan sporting dana atau anggaran dimana partisipasi yang tinggi dari lingkungan masyarakat sangat penting untuk membantu proses pembangunan agar dapat menghasilkan pembangunan yang baik serta bantuan dana juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam pembangunan .
5. Faktor penghambat merupakan hal yang paling mendasar dari suatu koordinasi dalam pembangunan. Hal tersebut yang menjadikan pola koordinasi di Kelurahan Kanaan tidak berjalan sepenuhnya, sebagaimana diketahui bahwa faktor penghambat yang ditemukan penulis yaitu kurangnya Koordinasi/komunikasi dan kesadaran masyarakat serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat cenderung masa bodoh atau tidak peduli dalam pembangunan yang ada yang kemudian menjadi fakta penguat bahwa terjadinya ketimpangan dari teori koordinasi yang seutuhnya.

Saran

1. Agar partisipasi masyarakat Kelurahan Kanaan bisa maksimal dalam perencanaan program pembangunan, hendaknya Lurah dengan LPM bisa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Diadakan rapat pada tingkat RT untuk membahas usulan yang akan di usulkan sehingga pada tingkat RT sudah dapat usulan sekala prioritas.
 - b. Kelurahan membuat surat sebelum dilaksanakannya partisipasi dalam pembangunan yang diserahkan ke RT.
2. Agar ditingkatkan lagi Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan fungsi koordinasinya dalam pembangunan

yang khususnya bersifat fisik. Harus adanya sosialisasi supaya masyarakat mengerti pentingnya kebersamaan, sehingga proses pembangunan berjalan dengan lancar.

3. Dalam pelaksanaan program pembangunan hendaknya pemerintah:
 - a. Pemerintah hendaknya melaksanakan pelatihan atau pendidikan khusus kepada Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) agar mampu menunjang program pelaksanaan pembangunan.
 - b. Pemerintah hendaknya lebih melakukan sosialisasi atau pengarahan kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan atau dialog yang melibatkan masyarakat agar masyarakat lebih memahami program pembangunan yang berlangsung.

Daftar Pustaka

- Dahuri, R., dan Nugroho, Iwan, 2004. *Pembangunan Wilayah*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Damanhuri, Didin S. 2010. *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press
- Khairuddin. 2000. *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek Sosiologi Ekonomi dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty
- Sugiyono. 2015:64. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indi Press
- Muljana, B.S. 2001. *Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: UI-Press.
- Nasution, Zulkarimen. 2004. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nawawi, Ismail. 2009. *Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian, Konsep, Model, Teori, dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetomo. 2008. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Pemerintahan No 73 Tahun 2005
- Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2002 pasal 10 dan 11